

GUBRI ABDUL WAHID PIMPIN RAKOR TPID RIAU, FOKUS PENGENDALIAN INFLASI RAMADAN DAN IDULFITRI



Sumber gambar:

<https://mediacenter.riau.go.id/uploads/17416759291000096760.jpg>

Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau. Rapat ini digelar untuk membahas strategi pengendalian inflasi saat Ramadan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1446 H. Acara berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Selasa (11/3/2025).

Rapat dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Riau, Kepala Perwakilan BI Riau Panji Achmad, Kepala BPS Riau Asep Riyadi, serta bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. Pertemuan ini fokus pada upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan selama Ramadan dan Idulfitri.

Mengawali sambutannya, Gubri Abdul Wahid menyampaikan bahwa inflasi bulanan Riau pada Februari 2025 tercatat sebesar 0,50 persen, sementara inflasi tahunan berada di angka 0,02 persen. "Hasil ini lebih rendah dari inflasi Januari 2025 yang sebesar 1,12 persen. Perkembangan inflasi ini masih di bawah sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen," jelasnya.

"Penurunan tekanan inflasi ini didorong oleh inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta makanan, minuman, dan tembakau. Terutama komoditas tarif listrik, daging ayam ras, dan bawang merah," tambah Abdul Wahid.

Namun, Gubri mengingatkan bahwa tekanan inflasi di Riau diperkirakan akan meningkat pada Maret 2025. Sesuai historisnya, peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilisasi masyarakat selama Ramadan dan menjelang Lebaran menjadi faktor utama.

Selain itu, ada potensi kenaikan tarif listrik Prabayar, gangguan produktivitas dan distribusi pangan akibat curah hujan tinggi, kenaikan harga minyak goreng, dan peningkatan permintaan emas.

Terkait curah hujan tinggi dan banjir di beberapa daerah, Gubri berkomitmen untuk mengatasi hambatan distribusi barang. "Kami akan bekerja sama dengan bupati dan wali kota untuk memastikan distribusi barang tidak terganggu. Perbaikan ruas jalan yang rusak akan segera dilakukan agar aktivitas distribusi tetap lancar," tegasnya.

Gubri juga menyampaikan arahan Presiden RI terkait upaya pengendalian inflasi. "Peningkatan produksi pangan untuk mencapai swasembada pangan nasional, memastikan ketersediaan stok beras, mengendalikan impor pangan, mengantisipasi dampak bencana cuaca, melakukan tanam serentak, serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga adalah langkah-langkah penting yang harus kita lakukan," paparnya.

"Sinergitas dan koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau sangat penting dalam pengendalian inflasi, menjaga stabilitas pasokan, dan harga pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri," tuturnya.

Gubri menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi akan terus dilakukan dengan fokus pada kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. "Dengan kerangka 4K, kita dapat memantau kondisi dan situasi secara efektif, sehingga langkah-langkah pengendalian inflasi dapat diambil dengan tepat," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90392/gubri-abdul-wahid-pimpin-rakor-tpid-riau-foku.html>, "Gubri Abdul Wahid Pimpin Rakor TPID Riau, Fokus Pengendalian Inflasi Ramadan dan Idulfitri", 11 Maret 2025; dan
2. <https://catatanriau.com/news/detail/24030/bupati-rokan-hulu-hadiri-rakor-tpid-riau-bahas-strategi-pengendalian-inflasi-jelang-idul-fitri>, "Bupati Rokan Hulu Hadiri Rakor TPID Riau Bahas Strategi Pengendalian Inflasi Jelang Idul Fitri", 11 Maret 2025.

Catatan:

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024, Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun, untuk bentuk sasaran inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*) dengan tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:

- a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
- b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
- c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).

Pengukuran IHK

IHK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018, IHK dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yaitu

1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau;
2. Kelompok pakaian dan alas kaki;
3. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga;
4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga;
5. Kelompok kesehatan;
6. Kelompok transportasi;
7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan;
8. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya;
9. Kelompok pendidikan;
10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan

11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Mengutip Berita Resmi Statistik No.23/04/Th.XXVII, tanggal 1 April 2024 Pada Maret 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,13. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,17 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,62 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,56 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen. Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Maret 2024 sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Maret 2024 sebesar 0,93 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2024 sebesar 1,77 persen; inflasi m-to-m sebesar 0,23 persen; dan inflasi y-to-d sebesar 0,57 persen.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau